ANALISIS ESENSI CIVICS SEBAGAI GENERASI PERTAMA PKN di INDONESIA

**Reno Francius Simanullang¹, Susanna Br. Ginting², Reh Bungana Beru Parangin-Angin³,
Deny Setiawan⁴**

Email : renosimanullang40@gmail.com, susan.ginting05@gmail.com,
rehbungana@gmail.com, denysetiawan1978@gmail.com

^{1,2,3} Program Pascasarjana Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam suatu negara dalam negara demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan dalam sistem persekolahan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik harus memiliki nilai-nilai atau watak dan keterampilan untuk hidup dalam negara demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mendeskripsikan sejarah civics sebagai generasi pertama PKN di Indonesia, Menganalisis nilai-nilai civics yang terkandung dan tertanam hingga saat ini. Subjek penelitian termasuk Guru BK, Guru PPKn, dan Siswa. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. - Analisis data melibatkan tiga tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode validitas data melibatkan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civics memberikan banyak nilai yang dapat dipelajari dari pembelajaran civics, seperti percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi.

Kata Kunci : Nilai, Civics, Generasi, PKN

Abstract

This article discusses the nature of civic education in a country in a democratic country. Civic education is part of education in the school system to educate citizens to become good citizens. Good citizens must have values or character and skills to live in a democratic country. The purpose of this study is to: Describe the history of civics as the first generation of PKN in Indonesia, Analyze the values of civics contained and embedded to date. The subjects of the study included BK Teachers, PPKn Teachers, and Students. Data collection methods involved observation, interviews, and documentation. - Data analysis involved three stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity methods involved credibility tests, transferability tests, dependability tests, and confirmability. The results of the study showed that civics provided many values that can be learned from civics learning, such as self-confidence, commitment, mastery of religious values, norms and noble morals, values of justice, democracy, tolerance.

Keywords : Values, Civics, Generation, PKN

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan, dikenal sebagai Civic Education atau Citizenship Education dalam Bahasa Inggris, merupakan program pendidikan yang fokus pada pembentukan warga negara. Tujuannya adalah agar warga negara dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara cerdas, terampil, dan berkarakter, sehingga menjadi sumber daya yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Sabillah et al., 2023).

Melihat hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di atas, defenisi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat diartikan sebagai program pendidikan yang mencakup ke dalam beberapa dimensi. Menurut Cholisin (Manalu & Najicha, 2022), Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang memfokuskan materi pada peran warga negara dalam kehidupan bernegara. Pendidikan ini bertujuan untuk membina peran warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Menurut Somantri (2001), Pendidikan Kewarganegaraan didefinisikan sebagai program pendidikan yang mencakup demokrasi politik dan sumber-sumber pengetahuan lainnya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta sikap dan tindakan demokratis dalam mempersiapkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dua konsep ini menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan pada dimensi politik atau demokrasi politik. Sapriya (2012) defines Pendidikan Kewarganegaraan as a program that focuses on character and moral education. Seperti yang disebutkan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter warga negara sehingga mereka menjadi warga negara yang cerdas dan baik.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan untuk warga negara, dirancang khususnya untuk generasi muda agar dapat berperan aktif sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung-jawab. Menurut Kerr (Raharjo, 2020), Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Sipil didefinisikan sebagai "... ditafsirkan secara luas untuk mencakup persiapan pemuda untuk peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan, khususnya, peran pendidikan (melalui sekolah, pengajaran, dan pembelajaran) dalam proses persiapan tersebut. Definisi ini, menunjukkan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warganegara. Sementara itu di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang sebagai program pendidikan dengan tujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan modern. Negara kebangsaan adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan, di mana masyarakat bertekad untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, meskipun memiliki perbedaan agama, ras, etnis, atau golongan. Menurut Branson (Pertiwi et al., 2021), Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks demokrasi adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan otonom. Pemerintah otonom demokratis berarti negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri untuk membangun negara kebangsaannya itu bersama seluruh warga. Oleh karena itu, pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai program pendidikan di persekolahan (Paranita, 2022) kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional; 2) dokumen negara, khususnya Pancasila, UUD 1945 dan perundangan negara serta sejarah perjuangan bangsa (Widodo & Nugraha, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang mencakup berbagai aspek seperti religius, sosio-kultural, berbahasa, berbangsa, dan bernegara agar menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Method

Bagian metode harus ditulis singkat, padat, jelas, tetapi mencukupi. Ia menjelaskan penggunaan metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (Hendra & Hajri, 2023), penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat post positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah tanpa menggunakan eksperimen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, sedangkan analisis data bersifat induktif atau

Reno Francius Simanullang, Susanna Br. Ginting, Reh Bungana Beru Parangin-Angin, Deny Setiawan | Analisis Esensi Civics Sebagai Generasi Pertama Pkn Di Indonesia kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menilai nilai variabel tunggal atau lebih tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan yang lain (Usmi & Puspitaningrum, 2022).

Teknik pengumpulan data melibatkan: (1) Observasi, yang merupakan cara teliti untuk mengumpulkan data dengan pencatatan yang sistematis (Wijaya et al., 2020). wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. (3) Dokumentasi, menurut Djaelani (2013) dokumentasi merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebagai penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, interpretasi, kesimpulan.

Teknik analisis data terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan prosedur Triangulasi Teknik, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (Prayogi et al., 2023), dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Contohnya data dikumpulkan melalui wawancara, kemudian diverifikasi melalui observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Civics diperkenalkan di dunia untuk pertama kali pada tahun 1790 di Amerika Serikat. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu penduduk Amerika Serikat yang berasal dari berbagai negara di dunia dan memiliki keragaman suku bangsa. Diharapkan bahwa "Civics" dapat membantu mengukuhkan identitas kita sebagai warga Amerika.

Pengertian Civics menurut Henry Randall Waite adalah "The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collection, the individual in his relation to the state". Pengertian terjemahan umum pendidikan kewarganegaraan adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, ekonomi, politik) dengan individu-individu serta dengan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civic: memiliki banyak pengertian dan istilah. Tidak jauh berbeda dengan pengertian ini, Muhammad Numan Somantri (dalam Ubaedillah, 2015, hlm. 13) mengartikan hal yang sama bahwa Civics adalah sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan: (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); (b) individu-individu dengan negara”.

Secara etimologis, civic (s) berasal dari kata civis, civicus, atau civitas (Bahasa Latin), citizen (Bahasa Perancis), citizen (Bahasa Inggris) yang berarti anggota suatu masyarakat atau warga negara. Secara terminologis civics diartikan sebagai studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga Negara (Nanggala & Damayanti, 2023).

Dari beberapa pengertian yang terkandung dalam beberapa istilah kewarganegaraan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa konsep kewarganegaraan adalah suatu ajaran yang memuat pola-pola hubungan antara individu dan Negara atau antara Negara dan warganegara. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat publik karena menjadi warga negara berarti menjadi anggota dari satu komunitas politik. Komunitas politik memiliki beragam aspek, termasuk ideologi, sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, hak, kewajiban, dan lainnya. Semua aspek ini diatur oleh hukum yang dibuat berdasarkan proses yang berlaku di negara tertentu (Buka, 2022).

Untuk menciptakan warganegara yang baik di sebuah Negara, diperlukan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education). Menurut definisi ini, kewarganegaraan yang baik bergantung pada sistem kenegaraan atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Keberkatan seorang warga Amerika dapat diukur melalui hukum dan pemerintahan Amerika yang berlaku. Demikian pula di Indonesia, warga negara Indonesia yang baik hanya dapat diukur dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang menjadi dasar bagi peraturan nasional di seluruh negara di dunia. Pemerintahan suatu Negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip universal seperti demokrasi, HAM, keadilan, kemerdekaan, dan persamaan, meskipun penerapannya dapat bervariasi di setiap Negara.

Secara garis besar mata pelajaran kewarganegaraan terdiri dari:

a) Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara lebih rinci, materi pengetahuan kewarganegaraan mencakup pemahaman tentang prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law), serta peradilan yang independen dan tidak bias. Termasuk juga konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik.

b) Dimensi keterampilan kewarganegaraan (civic skills)

meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (civil society), keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik (Sihombing & Lukitoyo, 2021).

c) Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (civic values) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas (Nurdiansyah & Dhita, 2024).

Berdasarkan uraian di atas diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada dasarnya adalah suatu pilihan (Widiatmaka, 2023). Namun walaupun demikian Civics mampu memberikan nilai bagi bangsa Indonesia bahkan bagi pribadi masyarakat Indonesia sendiri. Dimana sesuai dengan Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 di masa pemerintahan Sukarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civics merupakan sebuah studi tentang tugas-tugas pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara dengan memiliki nilai kewarganegaraan seperti percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi yang dimana Indonesia memiliki banyak ragam agama, suku, ras dan bahasa dan ini disatukan oleh Pancasila atau yang sering disebut Bhineka Tunggal Ika (SW, 2020).

Pembahasan

Menurut Soemantri (Widiatmaka, 2022), sejarah perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan setelah kemerdekaan dimulai dengan pendidikan moral di Indonesia yang mencakup nilai-nilai kemasyarakatan, adat, dan agama. Pada tahun 1957, materi kewarganegaraan membahas proses penerimaan dan kehilangan status kewarganegaraan. Pada tahun 1961, istilah kewarganegaraan berubah menjadi civics yang membahas tentang sejarah nasional, sejarah Proklamasi, UUD 1945 Pancasila, pidato-pidato kenegaraan presiden, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa (Lin & Shek, 2021).

Pembelajaran civic dilakukan dengan menggunakan metode indoktrinasi. Pada tahun 1968, pemerintah menetapkan kurikulum yang baru dengan mengganti nama pelajaran Kewargaan Negara menjadi Pendidikan Kewargaan Negara/PKKn. Kemudian diadakan Seminar Nasional Pengajaran dan pendidikan civic di Tawangmangu Surakarta tahun 1972 yang menghasilkan antara lain; menetapkan istilah Ilmu Kewargaan Negara (IKN) sebagai pengganti civic, dan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai pengganti istilah civic education (Maatuk et al., 2022).

Pada kurikulum tahun 1989, Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2, yaitu Pancasila yang mengarah pada dimensi moral, diharapkan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kurikulum tahun 1994, fokus lebih pada usaha untuk mencantumkan elemen-elemen dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1994 diperkenalkan sebagai bagian dari implementasi UU No. Pada tahun 1989, diputuskan untuk menggabungkan pengajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi PPKn. Kurikulum tahun 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) juga mengubah nama dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Isi pendidikan ini mencakup beberapa aspek seperti Pancasila, persatuan dan kesatuan, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, serta globalisasi (Irfani et al., 2021).

Namun, berdasarkan amandemen UU No. 2 Tahun 1989 telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022. Pada tahun 2003, perubahan sistem pendidikan nasional mengakibatkan nama

mata pelajaran Pancasila tidak lagi disebutkan secara eksplisit, dan berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dimasukkan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum 2004 juga menggantikan PPKn dengan istilah Kewarganegaraan/Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan ini juga nampak diikuti dengan perubahan isi Pkn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum, dan moral (Ningsih et al., 2021). Perkembangan paradigma Pkn di Indonesia antara paradigma lama dan paradigma baru untuk memberikan istilah Pkn yang sejalan dengan tuntutan era reformasi yang sekarang dikembangkan dengan standar isi (Rahmayanti, 2023). Paradigma baru Pkn memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas. Paradigma ini berbasis pada ilmu politik, hukum, filsafat moral/filsafat Pancasila, dan memiliki visi yang kuat dalam nation and character building, citizen empowerment (pemberdayaan warga negara), serta mampu mengembangkan civil society (masyarakat kewargaan) yang memiliki arti penting dalam pembaharuan (Alifah et al., 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan sistem politik demokratis. Paradigma baru ini merupakan usaha menggantikan paradigma lama Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)/ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan diubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), yang ditandai oleh struktur keilmuan yang tidak jelas, materi yang disesuaikan dengan kepentingan politik rezim, serta visi untuk memperkuat statebuilding (negara otoriter birokratis) yang menempatkan warga negara sebagai kaula atau objek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Dampak situasi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) mengalami kesulitan dalam membangun karakter warga negara yang demokratis (Kandia, 2023).

Perkembangan sejarah Pkn di Indonesia mengalami pergantian nama dari Civics, Kewargaan Negara, PMP, PMK-Kn, PPKn, Pkn, dan dalam kurikulum 2013 kembali menjadi PPKn lalu dalam kurikulum merdeka menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi mengubah kembali menjadi Pkn. Perubahan ini juga terlihat diikuti dengan perubahan isi/konten pendidikan kewarganegaraan yang lebih memperjelas akar keilmuan (body of knowledge) yakni: politik, hukum, dan moral. Ini berarti Pkn sebagai program pendidikan dirancang berdasarkan keilmuannya yakni Civic yang dikembangkan dari: rumpun keilmuan politik (dengan berfokus pada demokrasi); rumpun keilmuan hukum (dengan berfokus pada rule of law dan penegakkannya); dan rumpun keilmuan filsafat moral (dengan berfokus pada general values/moral/etika) (Rahmayanti, 2023).

Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah penting untuk membekali warganegara agar mampu menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) adalah pendidikan yang penting untuk menata hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Dibutuhkan kompetensi yang terkait dengan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan. Pada akhirnya akan lahir warganegara yang cerdas secara sosial, spiritual, dan intelektual serta mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara dengan memiliki nilai kewarganegaraan seperti (Shim et al., 2018) percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi yang dimana Indonesia memiliki banyak ragam agama, suku, ras dan bahasa.

Referencess

- Alifah, M., Adha, M. M., Perdana, D. R., Hartino, A. T., & Rifai, A. (2021). *Upaya Meningkatkan Karakter Disiplin Peserta Didik Pada Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19*. [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/27545](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/27545)
- Buka, F. (2022). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Sosial Selama Masa Pembelajaran Daring. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3). [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56393/Mindset.V2i3.936](https://doi.org/https://doi.org/10.56393/Mindset.V2i3.936)
- Hendra, H., & Hajri, P. (2023). Kajian Komparasi Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia Dan Malaysia. *Foundasia*, 14(1), 42–54.
- Irfani, S., Riyanti, D., Muharam, R. S., & Suharno. (2021). Rand Design Generasi Emas 2045: Tantangan Dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kemajuan Indonesia. *Jurnal*

- Reno Francius Simanullang, Susanna Br. Ginting, Reh Bungana Beru Parangin-Angin, Deny Setiawan| Analisis Esensi Civics Sebagai Generasi Pertama Pkn Di Indonesia
Penelitian Kebijakan Pendidikan, 14(2). <https://doi.org/10.24832/jpkip.V14i2.532>
- Kandia, I. W. (2023). Sejarah Perjalanan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Di Indonesia. *Jocer: Journal Of Civic Education Research*, 1(2), 65–75.
- Lin, L., & Shek, D. T. L. (2021). Serving Children And Adolescents In Need During The Covid-19 Pandemic: Evaluation Of Service-Learning Subjects With And Without Face-To-Face Interaction. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 18(4), 2114. <https://doi.org/10.3390/ijerph18042114>
- Maatuk, A. M., Elberkawi, E. K., Aljawarneh, S., Rashaideh, H., & Alharbi, H. (2022). The Covid-19 Pandemic And E-Learning: Challenges And Opportunities From The Perspective Of Students And Instructors. *Journal Of Computing In Higher Education*, 34(1), 21–38. <https://doi.org/10.1007/S12528-021-09274-2>
- Manalu, Y. E. T., & Najicha, F. U. (2022). Analisis Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Indonesia Di Era Digital Serta Dampaknya Bagi Bangsa Dan Negara. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 192–197.
- Nanggala, A., & Damayanti, S. (2023). Membangun Smart And Good Young Citizens Melalui Program Organisasi Kepemudaan Berbasis Civic Literacy. *Bhineka Tunggal Ika; Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 10(1), 96–108.
- Ningsih, T., Yuwono, D., Sholehuddin, M., & Suharto, A. (2021). The Significant Of E-Assessment For Indonesian Literacy With Character Education In Pandemic Era. *Journal Of Social Studies Education Research*, 12(4), 231–256. <https://www.learntechlib.org/p/220460/>
- Nurdiansyah, E., & Dhita, A. N. (2024). Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembelajaran Moral Dan Karakter. *Jurnal Civic Hukum*, 9(1).
- Paranita, S. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Z Dalam Mewujudkan Good Citizenship Di Perguruan Tinggi Islam. *Civics Education And Social Science Journal (Cessj)*, 4(1), 35–46.
- Pertiwi, A. D., Nurfatihah, S. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Mata Pelajaran Pkn Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 4328–4333.
- Prayogi, R., Komalasari, K., & Nurgiansah, T. H. (2023). Kajian Perbandingan Civic Education Di Eropa Dan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2342–2355.
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum Ppkn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 Sampai Dengan Merdeka Belajar 2020. *Pkn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63–82. <https://doi.org/10.20961/pknp.V15i1.44901>
- Rahmayanti, E. (2023). The Use Of Films As An Educational Medium In Learning Civic Education As A Preventive Effort Against Moral Decradation In The Age Of 4.0. *Capture: Jurnal Seni Media Rekam*, 14(3), 257–278.
- Sabillah, M., Syamsudin, P. I., Sulthan, R., & Setiabudi, D. I. (2023). Analisis Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Pgmi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2). <https://doi.org/10.572349/civilia.V2i2.570>
- Sihombing, R. A., & Lukitoyo, P. S. (2021). Peranan Penting Pancasila Dan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 49–59. <https://doi.org/10.23887/jpku.V9i1.31426>
- Sw, Y. (2020). Problematika Pembelajaran Sejarah Daring Dan Solusinya Di Masapandemi Covid 19 Dalam Perspektif Pendidikan Karakter Bagi Siswa Kelas X Di Sma Veteran 1 Sukoharjo Tahunpembelajaran2020-2021. *Civics Education And Social Science Journal (Cessj)*, 2(2). <https://doi.org/10.32585/Cessj.V2i2.1142>

- Reno Francius Simanullang, Susanna Br. Ginting, Reh Bungana Beru Parangin-Angin, Deny Setiawan| Analisis Esensi Civics Sebagai Generasi Pertama Pkn Di Indonesia
- Usmi, R., & Puspitaningrum, A. (2022). Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21 Untuk Membentuk Kecerdasan Kewargaan Yang Berkeadaban Publik. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 12.
- Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Di Dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10.
- Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Warga Negara Yang Baik Dan Mengantisipasi Krisis Karakter Pemuda. *Jurnal Pallangga Praja (Jpp)*, 5(1), 7–18.
- Widodo, B., & Nugraha, Y. (2023). Internalisasi Pendidikan Qurani Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membentuk Karakter Religius Warga Negara Di Era Digital. *Civics: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 360–370.
- Wijaya, A. K., Gitono, U., & Adha, M. M. (2020). Kontribusi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Model Role Playing Untuk Pengembangan Keterampilan Intelektual Siswa. *Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Universitas Tanjungpura*, 1(2), 130–139.